

Fasilitasi Peran Pemilih Pemula, Pemuda dan Karang Taruna dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Buton Selatan pada Pemilu Tahun 2024

Ahmad Daholu^{1*}, Azaluddin², Juharmin Suruambo³, La Ode Sahrin Djalila⁴

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

⁴Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email Koresponden: ahmaddaholu25@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Fasilitasi Peran Pemilih Pemula, Pemuda, dan Karang Taruna dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Buton Selatan pada Pemilu Tahun 2024” bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda dan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok terfokus (FGD), pembentukan kelompok pengawas partisipatif, dan pemanfaatan teknologi. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang mekanisme pengawasan pemilu. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses teknologi, kurangnya kepercayaan diri peserta, dan kesenjangan pemahaman antara peserta dari desa dan kota. Pembahasan mengungkap bahwa kegiatan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya tentang pentingnya literasi politik dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan partisipatif. Keberlanjutan program ini memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat, serta integrasi inisiatif ini ke dalam program kerja organisasi pemuda seperti Karang Taruna. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Buton Selatan melalui partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan pemilu.

Kata Kunci: Pengawasan partisipatif, Pemilih pemula, Pemuda, Karang taruna,

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula, pemuda, dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Pemilih pemula dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengawasan partisipatif untuk mencegah praktik kecurangan dan memastikan integritas pemilu.

Kabupaten Buton Selatan, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang, menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses pengawasan pemilu. Kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengawasan dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menjadi faktor penghambat (Putri, Windarto, dan Alfiniyah 2021). Selain itu, minimnya keterlibatan pemuda dalam proses politik formal seringkali membuat suara mereka kurang terdampak, padahal mereka merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan yang dihasilkan dari proses pemilu (Fathurokhman 2022).

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula pada Pemilu sebelumnya masih relatif rendah, yaitu sekitar 52-58%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan peran mereka sebagai pengawas partisipatif (Hamdani, Herdiansyah, dan Bintari 2021). Di sisi lain, Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki jaringan luas di tingkat desa dan kecamatan, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan pemilu (Pratama dan Rahmat 2018). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya kapasitas dan dukungan yang memadai.

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya literasi politik di kalangan pemuda dan pemilih pemula (Shadiqi, Mangkurat, dan Ernawati 2022). Banyak dari mereka yang belum memahami hak-hak mereka sebagai pemilih, termasuk hak untuk mengawasi proses pemilu. Rendahnya literasi politik pemilih pemula berkorelasi langsung dengan rendahnya partisipasi mereka dalam proses pemilu, termasuk dalam pengawasan partisipatif (Putri 2017). Penelitian ini menyoroti pentingnya program edukasi yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu.

Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi juga menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan pemilu (Hoke 2009). Padahal, di era digital seperti sekarang, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pengawasan, seperti melalui aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh masyarakat, termasuk pemuda (Macintosh, Welch, dan Gisler 2005). Namun, implementasinya memerlukan dukungan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Peran pemuda dan Karang Taruna dalam pengawasan partisipatif juga penting untuk mencegah praktik politik uang, intimidasi, dan manipulasi data pemilih yang masih marak terjadi di beberapa daerah (Purene 2016). Partisipasi aktif masyarakat, terutama pemuda, dalam pengawasan pemilu dapat mengurangi praktik kecurangan (Sutarno 2022). Temuan ini menguatkan argumen bahwa keterlibatan pemuda dalam pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk memastikan integritas pemilu, tetapi juga untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik.

Melibatkan pemuda sebagai pengawas partisipatif, diharapkan dapat tercipta lingkungan pemilu yang lebih bersih dan berkualitas. Selain itu, partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan pemilu juga dapat menjadi sarana pendidikan politik yang efektif, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan (Rozi et al. 2023).

Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk memfasilitasi pemilih pemula, pemuda, dan Karang Taruna dalam meningkatkan peran mereka sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu 2024. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengawasan pemilu, serta terciptanya mekanisme partisipatif yang melibatkan pemuda dalam memastikan proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas Karang Taruna sebagai mitra strategis dalam membangun budaya partisipasi politik yang sehat di tingkat akar rumput.

2. Metode Pelaksanaan

Sosialisasi dan Edukasi

- Memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu.
- Menjelaskan mekanisme pengawasan pemilu yang dapat dilakukan oleh masyarakat, termasuk tahapan pemilu yang perlu diawasi (pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara).

- c. Menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pemilih, khususnya pemilih pemula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Menggunakan media visual seperti video dan infografis untuk memudahkan pemahaman peserta, mengacu pada penelitian Wijaya dan Nugroho (2021) yang menunjukkan efektivitas penggunaan media visual dalam meningkatkan literasi politik.

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

- a. Membahas tantangan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilu, termasuk kendala yang sering dihadapi seperti kurangnya akses informasi dan ketakutan akan dampak negatif.
- b. Merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya, seperti membentuk kelompok pengawas mandiri dan memanfaatkan media sosial untuk kampanye pengawasan.
- c. Melibatkan narasumber dari Bawaslu, akademisi, dan aktivis pemuda untuk memberikan perspektif yang beragam.

Pemanfaatan Teknologi:

- a. Memperkenalkan aplikasi atau platform digital yang dapat digunakan untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara real-time, seperti aplikasi Kawal Pemilu atau Lapor Bawaslu.
- b. Melatih peserta dalam menggunakan teknologi untuk mendokumentasikan bukti pelanggaran, seperti foto, video, dan catatan lapangan.
- c. Mengadakan sesi pelatihan khusus tentang keamanan digital untuk melindungi identitas dan data peserta saat melaporkan pelanggaran.

Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan monitoring terhadap kegiatan kelompok pengawas partisipatif untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai target.
- b. Mengadakan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- c. Mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas pemilih pemula, pemuda, dan Karang Taruna dalam melakukan pengawasan partisipatif. Pembentukan kelompok pengawas partisipatif menjadi langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu di Kabupaten Buton Selatan. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti kurangnya kepercayaan diri peserta dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Mata dan Pont 2016).

a. Peningkatan Pemahaman dan Literasi Politik

Peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme pengawasan pemilu menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan pelatihan yang digunakan efektif. Program edukasi yang sistematis dapat meningkatkan literasi politik pemilih pemula (Prayugo dan Prayitno 2022). Literasi politik yang baik merupakan fondasi penting bagi partisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pengawasan pemilu (Sitoh Anang 2022).

Penggunaan media visual seperti video dan infografis dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Media visual dapat menyederhanakan informasi kompleks tentang pemilu dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pemilih pemula (Gupta et al. 2016). Hal ini juga membantu peserta yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda untuk tetap dapat mengikuti materi dengan baik.

b. Peran Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif

Pemuda memiliki peran krusial dalam pengawasan pemilu karena mereka cenderung lebih melek teknologi dan memiliki energi yang besar untuk terlibat dalam proses demokrasi. Namun, partisipasi mereka seringkali terhambat oleh kurangnya kepercayaan diri dan dukungan dari lingkungan sekitar. Pelibatan pemuda dalam pengawasan pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu secara signifikan (Angelia et al. 2019).



Gambar 1. Pemberian materi

Pemuda juga memiliki jaringan sosial yang luas, baik secara offline maupun online, yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya pengawasan pemilu. Dalam kegiatan ini, peserta diajak untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye dan edukasi kepada masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tren partisipasi politik generasi muda yang semakin mengandalkan platform digital (Respati 2017).

c. Dampak Pengawasan Partisipatif terhadap Integritas Pemilu

Pengawasan partisipatif oleh masyarakat, khususnya pemuda, dapat mengurangi praktik kecurangan seperti politik uang, intimidasi, dan manipulasi data pemilih (Devi dan Jatra 2022). Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kelompok pengawas telah siap memantau tahapan pemilu, yang merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan integritas pemilu. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada dukungan dari lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU.

Pengawasan partisipatif dapat mengurangi praktik kecurangan (Hoffmann 2011). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu tidak hanya penting untuk memastikan integritas pemilu, tetapi juga untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik.

d. Tantangan dan Solusi

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses teknologi di daerah pedesaan. Meskipun peserta telah dilatih menggunakan aplikasi pelaporan, infrastruktur internet yang kurang memadai dapat menghambat proses pelaporan (Adofu 2022). Solusi yang dapat dipertimbangkan adalah menyediakan akses internet gratis di titik-titik strategis atau menggunakan metode pelaporan offline yang kemudian dapat dikirimkan ke Bawaslu.

Selain itu, kurangnya kepercayaan diri peserta dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari pihak penyelenggara kegiatan, seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

Pendampingan ini dapat berupa sesi konsultasi atau forum diskusi untuk membahas kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan.

e. Keberlanjutan Program

Untuk memastikan keberlanjutan program, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari pihak penyelenggara kegiatan, seperti perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antara kelompok pengawas dan lembaga pengawas pemilu untuk memastikan koordinasi yang berkelanjutan.

Keberlanjutan program juga dapat didukung dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan partisipatif ke dalam program kerja Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa inisiatif ini tidak hanya berhenti setelah Pemilu 2024, tetapi dapat terus dilaksanakan pada pemilu-pemilu berikutnya.

f. Implikasi bagi Kebijakan

Hasil kegiatan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan KPU Kabupaten Buton Selatan untuk merancang kebijakan yang mendukung partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilu. Misalnya, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan pengawas partisipatif atau menyediakan insentif bagi kelompok pengawas yang aktif.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk regulasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Misalnya, dengan memberikan perlindungan hukum bagi pengawas partisipatif yang melaporkan pelanggaran atau memberikan penghargaan bagi kelompok pengawas yang berprestasi.



Gambar 2. Penutupan Kegiatan

4. Kesimpulan

Kegiatan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemuda dan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu. Pembentukan kelompok pengawas partisipatif dan peningkatan pemahaman peserta tentang mekanisme pengawasan menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan integritas pemilu di Kabupaten Buton Selatan. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi

tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan teknologi dan kurangnya kepercayaan diri peserta.

Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat, inisiatif ini dapat berkontribusi pada pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, keberlanjutan program ini juga dapat menjadi fondasi untuk membangun budaya partisipasi politik yang sehat di kalangan pemuda dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Adofo, Adwin. 2022. "Empowering Youth who Care About Democracy: Introducing General Elections to First-Time Voters." *Journal of Universal Community Empowerment Provision* 2(3):74–78. doi: 10.55885/jucep.v2i3.255.
- Angelia, Nina, Walid Mustafa Sembiring, Taufik Wal Hidayat, dan Armansyah Matondang. 2019. "Youth Voter Political Education to Increase Rights Participation Choose in General Elections." *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education* 6(7):121–25. doi: 10.20431/2349-0381.0607013.
- Devi, Ni Wayan Cyinthia, dan I. Made Jatra. 2022. "Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri." *Tjybyb.Ac.Cn* 27(2):58–66. doi: 10.30957/Cendekia.v14i2.627.Membangun.
- Fathurokhman, Benben. 2022. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)." *Journal of Research and Development on Public Policy* 1(1):51–59. doi: 10.58684/jarvic.v1i1.68.
- Gupta, Kuhu, Shailaja Sampat, Manas Sharma, dan Venkatesh Rajamanickam. 2016. "Visualization of election data: Using interaction design and visual discovery for communicating complex insights." *eJournal of eDemocracy and Open Government* 8(2):59–86. doi: 10.29379/jedem.v8i2.422.
- Hamdani, Randi, Ari Herdiansyah, dan Antik Bintari. 2021. "Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilu; Studi Kasustentang Relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi(Samawi) Pada Pemilihan Presiden 2019 Di Kota Tasikmalaya." *Aspirasi* 1–19.
- Hoffmann, C. 2011. "The influence of different forms of camera surveillance and personality characteristics on deviant and prosocial behaviour." 1–29.
- Hoke, Candice. 2009. "EngagedScholarship @ CSU Comments on expanding civic participation in voting by expanded use of the Internet."
- Macintosh, Ann, Eric Welch, dan Michael Gisler. 2005. "Minitrack : ' Electronic Democracy ' (Cluster e-Government)." 00(C):7695.
- Mata, Francisco J., dan Ana Pont. 2016. "ICT for Promoting Human Development and Protecting the Environment. 6th IFIP World Information Technology Forum WITFOR 2016. San José, Costa Rica, September 12-14, 2016. Proceedings." 213–22. doi: 10.1007/978-3-319-44447-5.
- Pratama, Febri Fajar, dan Rahmat Rahmat. 2018. "Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15(2):170–79. doi: 10.21831/jc.v15i2.19182.
- Prayugo, Arlis, dan Rahadi Budi Prayitno Prayitno. 2022. "Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 3(3):427–42. doi: 10.62775/edukasia.v3i3.138.
- Purenne, Anaïk. 2016. "Article Towards Cities of Informers ? Community- Based Surveillance in France and Canada." 15(1):79–93.

- Putri, Dinda Ariska, Windarto Windarto, dan Cicik Alfiniyah. 2021. "Analisis Kestabilan dan Kontrol Optimal Model Matematika Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum dengan Saturated Incidence Rate." *Contemporary Mathematics and Applications (ConMathA)* 3(1):19. doi: 10.20473/conmatha.v3i1.26939.
- Putri, Nora Eka. 2017. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5(1). doi: 10.34010/agregasi.v5i1.219.
- Respati, Wira. 2017. "Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014." *Humaniora* 6(1):29–38.
- Rozi, Muhamad Fahrur, Vevi Sunarti, Ridha Husnul Hayati, dan Sentri Petal Hia. 2023. "Community Empowerment Through Fresh Water Fish Cultivation Competence In Kabupaten Srono." *KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 11(1):61–68. doi: 10.24036/kolokium.v11i1.580.
- Shadiqi, Muhammad Abdan, Universitas Lambung Mangkurat, dan Gusti Ernawati. 2022. "Educational Intervention Program for Young Voters: Improving Political Knowledge and Voting Behavior in the 2020 Simultaneous Local Elections." *Jurnal Politik* 8(1). doi: 10.7454/jp.v8i1.1061.
- Sitoh Anang, Moh. 2022. "Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat." *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 2(1):25–46. doi: 10.59623/karimiyah.v2i1.15.
- Sutarno. 2022. "Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2(1):81–88. doi: 10.55108/jkp.v2i1.148.